

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia era Globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat tak terkecuali dengan sistem informasi akuntansi (SIA). Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun organisasi publik dalam mengembangkan usahanya terutama yang berhubungan dengan informasi data keuangannya. Begitu pentingnya informasi keuangan sektor publik maka harus diikuti oleh sistem informasi keuangan yang berkualitas. Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika berdampak pada kepuasan pengguna sistem tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh McGill et al. (2003), dengan hasil penelitian kepuasan pengguna mencerminkan persepsi pengguna terhadap kualitas sistem dan kualitas informasi yang didapat. Penelitian lain yang menggambarkan kepuasan pengguna bergantung pada kualitas sistem dan kualitas informasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Apridiyanti et al (2020), dengan hasil penelitian *information system, information quality* mempunyai pengaruh positif terhadap *user satisfaction*. Dengan kata lain semakin baik kualitas sistem yang diterapkan akan berdampak pada hasilnya dan dapat menimbulkan kepuasan pengguna.

Suatu sistem yang berkualitas diharapkan dapat mempermudah penggunaannya dan memiliki kemampuan yang optimal pada saat dioperasikan dan berujung pada kepuasan pengguna, sehingga menghasikan informasi yang baik maka kualitas dari suatu sistem sangat diharapkan. Kepuasan pengguna

mengungkapkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh. Suatu sistem yang baik bukan hanya dilihat dari kecanggihannya tetapi juga dilihat dari penerimaan dan pemahaman pengguna yang merasa puas dengan sistem informasi yang dihasilkan.

Tingkat kepuasan ini pada akhirnya mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja penggunaan sistem informasi yang diimplementasikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwidyasari & Syafruddin (2017) dengan hasil penelitian kepuasan pengguna dipengaruhi oleh lima faktor yang meliputi keamanan dan kerahasiaan, kepercayaan, kemudahan akses, pengertian atas pelayanan publik, dan kualitas pelayanan publik. Dari hasil analisis data dan uji hipotesis, seluruh faktor yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan e-government, kecuali faktor keamanan dan kerahasiaan serta pengertian atas pelayanan publik. Wicaksono & Mispiyanti (2019) dengan hasil penelitian kepuasan pengguna dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan faktor infrastruktur teknologi dan efikasi diri.

Dengan dikeluarkannya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan yaitu sistem yang mampu mengolah data-data

(*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Sistem yang diterapkan dalam organisasi diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan mampu memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar bagi pengguna informasi tersebut.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah atau secara luas standar akuntansi keuangan sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang informasi keuangannya diharapkan transparan karena merupakan pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang milik negara.

Organisasi sektor publik memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pemerintahan organisasi sektor publik erat kaitannya dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pihak- pihak terkait yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Sekretariat Daerah (Setda), Kepala Daerah (Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siregar (2017). SKPD adalah komponen penting dalam suatu pemerintahan.

SKPD bertugas dalam pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tugas dari bendahara umum daerah yakni untuk menerbitkan

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada Dinas pemerintah. Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini juga membuat Dokumen – Dokumen Anggaran seperti Anggaran Pendapatan Belanja, Anggaran Belanja tidak Langsung, dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam pengelolaan anggaran di SKPD biasanya kantor pemerintah tersebut menggunakan aplikasi untuk mempermudah pekerjaannya, seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Program aplikasi informasi manajemen keuangan daerah memiliki banyak fungsi dalam hal menghitung anggaran pemerintah daerah, dan pembuatan laporan keuangan.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan suatu aplikasi komputer yang dirancang sebagai aplikasi untuk membantu pemerintah daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah informasi berupa laporan keuangan akan lebih cepat, aman dan akurat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulila (2019) dengan hasil penelitian Menunjukkan dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) keuangan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat.

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemdagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Selain itu juga disajikan

sistem dan prosedur keuangan daerah berserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi.

Penyajian laporan keuangan dalam pemendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Tindak lanjut dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat melalui Deputi Pengawasan Bidang penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Lembaga pengawasan, pembinaan dan pengendalian intern pemerintah memberikan respon positif atas terbitnya pemendagri ini dengan mencoba menjawab tantangan tersebut dengan merancang dan menyusun suatu program aplikasi sistem keuangan daerah yang mampu memberikan informasi terintegritas dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan Pengembangan Program aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) ini adalah :

1. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
2. Aplikasi Simda dikembangkan bersifat generik/berbagi pakai atau dapat digunakan seluruh pemda sehingga pemda tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi.

3. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah;
4. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
5. Meningkatkan penguasaan aparat daerah dalam pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
6. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sampai dengan tahun 2020 Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemda dari 542 pemerintah daerah dan khusus SIMDA keuangan telah di implementasikan ke 394 Pemda. (Tim Aplikasi SIMDA- BPKP).

Di Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bone Bolango khususnya BKPAD telah mulai menggunakan aplikasi SIMDA ini sejak tahun 2006, akan tetapi penggunaan SIMDA belum secara keseluruhan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan karena masih ada data-data yang tersajikan secara manual dan harus diposting dalam SIMDA. Mulai Tahun 2007 BKPAD mulai full dalam penggunaan aplikasi ini dengan sudah bisa sistem online ke SKPD lain. Dari opini pemerintah Bone Bolango diperoleh informasi dari Badan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BKPAD) hingga sekarang SIMDA yang berkembang walaupun sudah bersifat online tetapi belum Web.

Meskipun belum maksimal pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh sisi positif dalam penerapan SIMDA ini, karena dilihat dari perkembangannya Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK diperoleh Opini Wajar dengan pengecualiaan (WDP) sebanyak 5 kali dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali.

Tabel 1.1 Opini BPK atas Pemda Kabupaten Bone Bolango tahun 2007-2020

PEMDA (Pemerintah Daerah)	Opini	
	Tahun 2007 – 2012	Tahun 2013 – 2020
Kab. Bone Bolango	5 WDP	8 WTP

Sumber : LHP BPK-RI di Kab. Bone Bolango

Berdasarkan tabel 1.1 dipahami bahwa sejak diterapkannya sistem informasi manajemen keuangan daerah menggunakan aplikasi SIMDA, laporan keuangan pada pemda Kabupaten Bone Bolango dari tahun ke tahun semakin membaik dan mampu dipertahankan. Sehingga apabila hasil dari penggunaan SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka seharusnya menimbulkan kepuasan jasa terhadap pemakai sistem SIMDA sesuai dengan pernyataan McGill (2003) yaitu kualitas sistem dan kualitas informasi yang di dapatkan akan mempengaruhi kepuasan pengguna, sehingga penerapan SIMDA keuangan dengan prestasi yang didapatkan menggambarkan kepuasan pemakai sistem akuntansi.

Namun penggunaan SIMDA masih menuai persoalan karena beberapa faktor yaitu lemahnya data management sistem karena sering terjadi perubahan buku panduan sesuai versi terbaru, rendahnya sumber daya manusia yang

memadai dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen, dan sering juga terjadi eror pada aplikasi. Berdasarkan Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Situs Resmi BPKP 2021 menerangkan bahwa dalam mengoperasikan SIMDA telah dilengkapi dengan sistem operasi, buku panduan, aplikasi software, proses transaksi, database, dan brainware. Untuk itu perlu pemahaman sejauh mana pengoperasian aplikasi program SIMDA serta perangkat pendukungnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut apakah hal tersebut juga sejalan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di kabupaten Bone Bolango pada saat sekarang ini. Maka peneliti melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Pemakai Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada Pemda Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar Pengaruh Buku Panduan, Sistem Operasi, *Software*, dan *Hardware* terhadap Kepuasan Pemakai Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango.
2. Seberapa besar Pengaruh Buku Panduan secara parsial terhadap Kepuasan Pemakaian Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango

3. Seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Operasi secara parsial terhadap Kepuasan Pemakaian Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango
4. Seberapa besar Pengaruh *Software* secara parsial terhadap Kepuasan Pemakaian Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango
5. Seberapa besar Pengaruh *Hardware* terhadap Kepuasan Pemakai Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Buku Panduan, Sistem Operasi, *Software*, dan *Hardware* terhadap Kepuasan Pemakai Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Buku Panduan secara parsial terhadap Kepuasan Pemakaian Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango
3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan Sistem Operasi secara parsial terhadap Kepuasan Pemakaian Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Software* secara parsial terhadap Kepuasan Pemakaian Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango

5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Hardware* terhadap Kepuasan Pemakai Jasa Informasi Akuntan Sektor Publik pada PEMDA Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dibidang Akuntansi Sektor Publik dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang SIMDA Keuangan dan dapat memberikan dampak positif bagi PEMDA (Pemerintahan Daerah) Bone Bolango.